

**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG BANGUNAN GEDUNG**



**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TARA KAN
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberadaan produk hukum daerah tersebut menjadi landasan yuridis dalam pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik, serta pengaturan hubungan kerja antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Oleh karena itu, kualitas dan relevansi produk hukum daerah sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Namun, dalam perkembangannya, produk hukum daerah sering kali dihadapkan pada berbagai permasalahan. Beberapa produk hukum daerah tidak lagi mampu menjawab kebutuhan dan dinamika perkembangan masyarakat, sehingga substansi pengaturannya menjadi tertinggal dan kurang mendukung percepatan pembangunan daerah. Selain itu, terdapat pula produk hukum daerah yang dalam implementasinya tidak berfungsi secara efektif dan efisien, baik karena ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perubahan kebijakan nasional dan daerah, maupun karena adanya ketentuan yang bersifat multitafsir dan sulit diterapkan di lapangan.

Secara normatif, kewajiban untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan diatur dalam Bab XA Pasal 95A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan tersebut mewajibkan pemerintah untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang setelah diundangkan, guna menilai ketercapaian tujuan, dampak, dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Meskipun secara eksplisit ketentuan ini mengatur mengenai Undang-Undang, prinsip evaluasi ex-post terhadap peraturan perundang-undangan pada hakikatnya juga relevan untuk diterapkan pada seluruh tingkatan produk hukum, termasuk prodyuk hukum daerah.

Prinsip tersebut sejalan dengan Pedoman Teknis Analisis dan Evaluasi Hukum (AEH) yang dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mendorong kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk secara berkala melakukan penilaian terhadap efektivitas, konsistensi, dan kebermanfaatan produk hukum yang telah ditetapkan. Melalui analisis dan evaluasi hukum, dapat diidentifikasi permasalahan

normatif maupun implementatif dari suatu peraturan, sekaligus dirumuskan rekomendasi perbaikan, baik berupa perubahan, pencabutan, maupun penyusunan regulasi baru.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik, tertib, dan adaptif terhadap perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kota Tarakan perlu melakukan analisis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah secara berkala. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk hukum daerah yang berlaku tetap selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kondisi sosial masyarakat, serta arah dan tujuan pembangunan Kota Tarakan ke depan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung. Pemilihan produk hukum daerah yang dianalisis didasarkan pada pertimbangan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, dinamika kebijakan daerah, serta relevansi pengaturan terhadap kebutuhan dan tujuan pembangunan daerah. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan hukum daerah yang lebih responsif, efektif, dan berkeadilan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah materi muatan dan pengaturan dalam Produk Hukumn yang dianalisis telah sesuai dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta perkembangan kebijakan nasional terbaru?
2. Apakah pengaturan kelembagaan, kewenangan, dan norma dalam Produk Hukum yang dianalisis telah dirumuskan secara jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan potensi multitafsir dalam pelaksanaannya?
3. Sejauh mana Produk Hukum yang dianalisis efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan aktual daerah?

C. TUJUAN

1. Untuk menilai kesesuaian materi muatan dan pengaturan dalam Produk Hukum yang dianalisis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta perkembangan kebijakan nasional terbaru.
2. Untuk mengidentifikasi kejelasan, konsistensi, dan keselarasan pengaturan kelembagaan, kewenangan, dan norma dalam Produk Hukum guna mencegah potensi multitafsir dan ketidaksinkronan dalam pelaksanaannya.

3. Untuk menilai efektivitas pelaksanaan Produk Hukum dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan aktual daerah.

D. RUANG LINGKUP

Untuk menjawab permasalahan di atas, ruang lingkup analisis dan evaluasi produk hukum daerah ini difokuskan pada pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap sejumlah Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Tarakan. Analisis dan evaluasi dilakukan guna menilai kesesuaian substansi pengaturan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, efektivitas pelaksanaan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan daerah.

Ruang lingkup analisis dan evaluasi meliputi penilaian terhadap aspek normatif, implementatif, serta dampak pengaturan dari masing-masing produk hukum daerah. Secara khusus, analisis dan evaluasi dilakukan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung.

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah tersebut dibatasi pada pengkajian substansi pengaturan, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta pelaksanaan dan dampaknya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil analisis dan evaluasi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang jelas dan terukur, baik berupa kebutuhan perubahan, pencabutan, maupun penyusunan pengaturan baru guna meningkatkan kualitas produk hukum daerah di Kota Tarakan.

E. METODE EVALUASI

Analisis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang mengacu pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019. Pedoman tersebut digunakan sebagai kerangka metodologis dalam menilai kualitas, kesesuaian, serta efektivitas produk hukum daerah yang berlaku di Kota Tarakan.

Metode ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris terbatas, dengan menitikberatkan pada pengkajian substansi norma, keterkaitan antar peraturan perundang-undangan, serta implementasi pengaturan di lapangan. Dalam pelaksanaannya, analisis dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan beberapa dimensi penilaian sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi permasalahan normatif maupun implementatif dari peraturan perundang-undangan yang dievaluasi.

Adapun dimensi-dimensi yang digunakan dalam analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan telah mengakomodasi dan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta digunakan sebagai variabel dan indikator dalam melakukan penilaian terhadap substansi pengaturan. Melalui dimensi ini, dianalisis apakah norma yang diatur telah mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta kesejahteraan sosial.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Dimensi ini digunakan untuk menilai kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa pengaturan yang dimuat telah sesuai dengan kedudukan peraturan tersebut dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional.

Bahwa norma hukum disusun secara berjenjang dalam suatu hierarki, di mana norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, hingga pada norma dasar (*grundnorm*). Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*). Penilaian dimensi ini juga mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah.

3. Dimensi disharmoni pengaturan

Dimensi disharmoni pengaturan digunakan untuk mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian atau pertentangan norma dalam suatu peraturan perundang-undangan, baik secara internal maupun eksternal. Disharmoni pengaturan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. pertentangan dengan peraturan pelaksanaannya;
- b. perbedaan pengaturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
- c. benturan kewenangan antar instansi akibat pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif untuk mengetahui potensi disharmoni terkait pengaturan mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, serta definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dilakukan dengan memperhatikan

batas kewenangan, lembaga atau pejabat pelaksana, prosedur pelaksanaan, hubungan tata kerja, serta pembagian kewenangan antar sektor maupun antara pusat dan daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Dimensi kejelasan rumusan digunakan untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan telah disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Penilaian dilakukan terhadap sistematika pengaturan, pilihan kata dan istilah, teknik penulisan, serta penggunaan bahasa hukum yang lugas, pasti, dan konsisten.

Peraturan perundang-undangan harus menggunakan bahasa yang hemat kata, objektif, serta membakukan makna kata, ungkapan, dan istilah yang digunakan. Selain itu, definisi dan batasan pengertian harus dirumuskan secara cermat agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum khusus sesuai dengan bidang hukum yang diatur. Penilaian pada dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah mencerminkan asas-asas tertentu sesuai dengan bidang hukum yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

6. Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Dimensi efektivitas pelaksanaan digunakan untuk menilai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara nyata serta mencapai tujuan pembentukannya. Setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas, dapat dilaksanakan, serta berdaya guna dan berhasil guna.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan melihat kesesuaian antara tujuan yang menjadi dasar pembentukan peraturan (*law in the book*) dengan pelaksanaannya di masyarakat (*law in action*). Penilaian ini didukung oleh data dan informasi terkait implementasi peraturan perundang-undangan. Apabila tujuan pembentukan peraturan telah tercapai dalam praktik, maka peraturan tersebut dapat dinilai efektif. Sebaliknya, apabila tujuan tersebut belum atau tidak

tercapai, maka implementasi peraturan dinilai belum efektif dan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan realitas.

Dalam pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kota Tarakan Tahun 2025, dimensi yang digunakan difokuskan pada Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undanga dan Dimensi Disharmoni Pengaturan. Pemilihan dimensi tersebut disesuaikan dengan karakteristik produk hukum daerah yang dianalisis serta permasalahan yang ditemukan dalam implementasinya.

BAB II

PEMBAHASAN

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung dilakukan dengan menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan. Dimensi ini digunakan untuk menilai keselarasan norma dalam peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya setelah adanya perubahan kebijakan nasional di bidang bangunan gedung.

a. Disharmoni pengaturan definisi dan ruang lingkup pengaturan

Ketentuan Pasal 24 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang selanjutnya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap penyesuaian definisi dan ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi, ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 belum memuat pengaturan mengenai Pengkaji Teknis sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, definisi mengenai jasa konstruksi serta pengaturan terkait Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) belum disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya disharmoni norma secara vertikal antara peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta hambatan dalam pelaksanaan perizinan dan pengawasan bangunan gedung di daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian definisi dan ruang lingkup pengaturan agar selaras dengan perkembangan hukum nasional di bidang bangunan gedung.

b. Disharmoni pengaturan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung

Ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah yang mengatur mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung belum sepenuhnya selaras dengan pengaturan terbaru sebagaimana diatur dalam Pasal 24 serta Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah tersebut telah memperbarui pengaturan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung secara lebih rinci, sistematis, dan berbasis risiko.

Selain itu, ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah yang berkaitan dengan klasifikasi bangunan gedung juga belum sepenuhnya menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penentuan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, khususnya pada tahap perencanaan, perizinan, dan pengawasan.

Disharmoni pengaturan tersebut dapat berdampak pada ketidaksinkronan kebijakan teknis di daerah serta menghambat keterlaksanaan norma di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian norma dalam Peraturan Daerah agar pengaturan mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menjamin kepastian hukum dan efektivitas pengaturan.

c. Disharmoni ketentuan pidana

Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Peraturan Daerah untuk memuat ancaman pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjadi perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan nasional. KUHP Nasional tidak lagi mengenal pidana kurungan sebagai jenis pidana dan memperkenalkan sistem kategori denda sebagai pengganti pengaturan denda nominal secara langsung dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

Pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah yang masih memuat pidana kurungan menjadi tidak selaras dengan perkembangan hukum pidana nasional dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Oleh karena itu, ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan dengan sistem kategori denda sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional.

Penyesuaian dimaksud dilakukan dengan ketentuan bahwa sanksi pidana kurungan yang dirumuskan secara tunggal dikonversi menjadi pidana denda kategori I, sedangkan sanksi pidana yang dirumuskan secara alternatif atau kumulatif disesuaikan menjadi pidana denda kategori II dengan nilai denda maksimal yang setara, yaitu hingga Rp10.000.000,00 atau Rp50.000.000,00. Penyesuaian ini bertujuan untuk menjaga keselarasan antara Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menjamin kepastian dan efektivitas penegakan hukum.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung dengan menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan menunjukkan bahwa substansi pengaturan dalam Peraturan Daerah tersebut belum sepenuhnya selaras dengan perkembangan kebijakan nasional di bidang bangunan gedung. Perubahan mendasar yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, menuntut adanya penyesuaian norma dalam peraturan daerah agar tetap relevan dan memiliki kepastian hukum.

Disharmoni pengaturan ditemukan pada aspek definisi dan ruang lingkup pengaturan, terutama terkait belum diakomodasinya pengaturan mengenai Pengkaji Teknis, ketidaksesuaian definisi jasa konstruksi, serta pengaturan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) yang belum mengikuti ketentuan terbaru. Selain itu, pengaturan mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dalam Peraturan Daerah belum sepenuhnya menyesuaikan dengan sistem pengaturan yang lebih rinci, sistematis, dan berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam proses perencanaan, perizinan, dan pengawasan bangunan gedung di daerah.

Di sisi lain, ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 juga menunjukkan disharmoni dengan sistem pemidanaan nasional setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan sanksi pidana yang masih memuat pidana kurungan tidak lagi selaras dengan ketentuan hukum pidana nasional yang telah menghapus pidana kurungan dan menerapkan sistem kategori denda. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 perlu dilakukan penyesuaian secara komprehensif, baik pada aspek definisi, fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, maupun ketentuan pidana, guna menjaga keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menjamin kepastian hukum, serta meningkatkan efektivitas pengaturan dan penegakan hukum di bidang bangunan gedung di daerah.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan atas hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian norma, efektivitas pelaksanaan, serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah pengampu/pemrakarsa agar menindaklanjuti hasil Analisis dan Evaluasi dengan mengajukan perencanaan penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota ke dalam Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Tahun 2026.

2. Kepala Perangkat Daerah pengampu/pemrakarsa agar menyusun Rancangan Produk Hukum Daerah dimaksud secara komprehensif dan sistematis.
3. Kepala Perangkat Daerah pengampu/pemrakarsa agar memastikan bahwa penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk asas kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, serta keterbukaan dalam proses penyusunannya.
4. Dalam rangka menjamin keselarasan kebijakan dan kualitas substansi pengaturan, Kepala Perangkat Daerah pengampu/pemrakarsa agar mengoordinasikan seluruh tahapan perencanaan dan penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah tersebut dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan.

Tarakan, 31 Desember 2025
Kepala Bagian,

Kamal, S.H., M.Pd
Pembina / IV.a
NIP. 19770228 200701 1 013

TABEL KERJA

Status

No.	Produk Hukum	Waktu Pengesahan	Lembaran Daerah (LD) / Tambahan Lembaran Daerah (TLD)	Jumlah Pasal	Riwayat Perubahan/Pencabutan	Peraturan Pelaksana
	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung	12 April 2016	Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 17	190		

Lembar Kerja

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 s.d 4			- Definisi jasa konstruksi dan TABG, perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 16 Tahun 2021. - Tidak memuat pengaturan mengenai Pengkaji Teknis sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung.	Ketentuan Pasal 24 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap penyesuaian definisi dan ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi, ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah belum memuat pengaturan mengenai Pengkaji Teknis sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, definisi mengenai jasa konstruksi serta ketentuan terkait Tim	

					Ahli Bangunan Gedung (TABG) belum disesuaikan dengan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian norma serta ketidakpastian hukum dalam penerapan Peraturan Daerah, sehingga diperlukan penyesuaian definisi dan pengaturan agar selaras dengan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan mengenai bangunan gedung.	
--	--	--	--	--	--	--

2	BAB II FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG Pasal 5 s.d Pasal 9		- Pengaturan fungsi bangunan gedung dalam Perda perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 24, Pasal 8, dan Pasal 11 PP Nomor 16 Tahun 2021. - Klasifikasi bangunan gedung yang diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), serta Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Perda belum selaras dengan Pasal 9 dan Pasal 10 PP Nomor 16 Tahun 2021.	Ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung perlu disesuaikan dengan pengaturan terbaru sebagaimana diatur dalam Pasal 24 serta Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah memperbarui klasifikasi dan fungsi bangunan gedung secara lebih rinci dan sistematis. Selain itu, ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah yang berkaitan dengan klasifikasi bangunan gedung juga belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penentuan fungsi	
---	--	--	---	--	--

					dan klasifikasi bangunan gedung pada tahap perencanaan, perizinan, dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian norma dalam Peraturan Daerah agar pengaturan mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menjamin kepastian hukum dan keterlaksanaan pengaturan di lapangan.	
3	BAB III PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Pasal 10 s.d Pasal 108					
4	BAB IV PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Pasal 109 s.d Pasal 155					

5	BAB V TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG Pasal 156 s.d Pasal 160					
6	BAB VI PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Pasal 161 s.d Pasal 173					
7	BAB VII PEMBINAAN Pasal 174 s.d Pasal 179					
8	BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 180 s.d Pasal 183					

9	BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 184 s.d Pasal 185		- Ketentuan Pidana tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya terkait jenis dan sistem pemidanaan. - Perda masih memuat pidana kurungan yang tidak lagi dikenal dalam KUHP Nasional dan sanksi pidana telah dialihkan ke dalam bentuk pidana denda sesuai kategori.	Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah perlu dilakukan penyesuaian karena masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjadi perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan, khususnya terkait pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. KUHP Nasional tidak lagi mengenal pidana kurungan sebagai jenis pidana, serta memperkenalkan sistem kategori denda sebagai pengganti pengaturan denda nominal secara langsung. Berdasarkan ketentuan
---	---	--	--	--

				tersebut, pengaturan sanksi pidana dalam Perda yang masih memuat pidana kurungan menjadi tidak sesuai dengan perkembangan hukum pidana nasional dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Oleh karena itu, ketentuan pidana dalam Perda perlu disesuaikan dengan sistem kategori denda sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional. Penyesuaian dimaksud dilakukan dengan ketentuan bahwa sanksi pidana kurungan yang bersifat tunggal dikonversi menjadi pidana denda kategori I, sedangkan sanksi pidana yang dirumuskan secara alternatif atau kumulatif disesuaikan menjadi pidana denda kategori II dengan nilai denda maksimal yang setara, yaitu hingga Rp10.000.000,00 atau Rp50.000.000,00. Penyesuaian ini bertujuan untuk menjaga keselarasan antara Perda dan peraturan perundang-	
--	--	--	--	---	--

					undangan yang lebih tinggi serta menjamin kepastian dan efektivitas penegakan hukum.	
10	BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 186					
	BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 187					
	BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 188 s.d Pasal 190					